

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA BLITAR

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang tetap melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2022 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

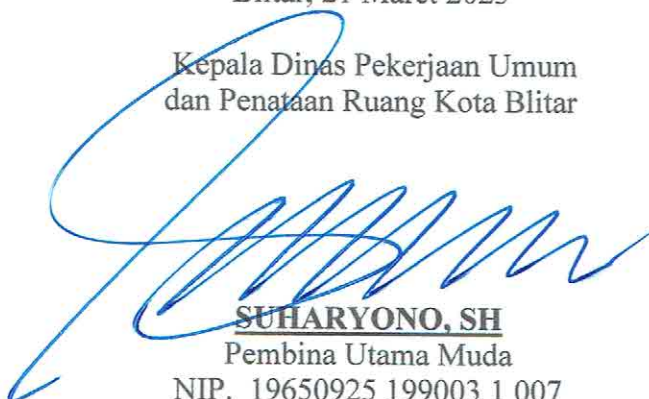
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2022. Laporan ini menggambarkan pencapaian indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2022 beserta permasalahan dan langkah perbaikannya.

Tanggapan (*feed back*) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan ini sangat diharapkan guna peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini pula disampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

Blitar, 21 Maret 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Blitar



SUHARYONO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650925 199003 1 007

EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2017 yang telah diganti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Didalam menjalankan tugasnya, terdapat isu-isu strategis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan diantaranya peningkatan ketersediaan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang dan berkelanjutan, penguatan sistem drainase dan jalan, dan penguatan pengendalian pemanfaatan ruang secara terintegrasi. Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar menyusun program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja utama dan program kegiatan selama tahun 2022, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang menguraikan pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2022 dari 8 (delapan) sasaran. Sasaran 1, yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur bina marga dengan indikator Indeks infrastruktur bina marga dari target 76,20% telah terealisasi 77,01% pada tahun 2022 atau tercapai 101,18%. Sasaran 2, yaitu Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dengan indikator Indeks infrastruktur sumber daya air dari target 97% telah terealisasi 97% atau tercapai 100%. Sasaran 3, yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur cipta karya dengan indikator Persentase gedung pemerintah sesuai standar dari target 94,60% terealisasi 94,60% atau tercapai 100%. Sasaran 4, yaitu Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi dengan indikator Persentase peran aktif jasa konstruksi dari target 43,48% terealisasi 71,60% atau tercapai 164,67%. Sasaran 5, yaitu Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM dengan indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses sistem penyediaan air minum (SPAM) dari target 2,45% terealisasi 0,25% atau tercapai 10,20%. Sasaran 6, yaitu Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD dengan indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dari target 9,07% terealisasi 0,27% atau tercapai 2,98%. Sasaran 7, yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator Persentase

penyelenggaraan penataan ruang dari target 40,55% terealisasi 57,33% atau tercapai 141,38%. Sasaran 8, yaitu Meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari target A 84,43 terealisasi A 84,21 atau tercapai 99,74%.

Selain prestasi capaian realisasi kinerja yang melebihi target, Penghargaan sebagai Pemenang I (Kategori Pemerintah Kota) Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Kebinamargaan dalam rangka Hari Jalan 2022 juga diraih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar. Hal tersebut di atas diperoleh tidak lepas dari berbagai faktor pendukung, diantaranya peran *stakeholder* dalam peningkatan infrastruktur; peran aktif masyarakat; peningkatan kualitas pekerjaan dari penyedia jasa; pelaksanaan pengendalian penataan ruang yang berjalan efektif; serta dukungan dari seluruh Perangkat Daerah Kota Blitar.

Upaya dan strategi dilakukan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja tahun 2022 ini diantaranya peningkatan ketersediaan dan kualitas jalan dan jembatan; peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan irigasi; peningkatan ketersediaan dan kualitas drainase; optimalisasi pengelolaan air limbah; peningkatan akses air minum; peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan gedung; serta peningkatan kualitas perencanaan tata ruang.

Pencapaian kinerja utama dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 dapat dikatakan baik, walaupun masih terdapat beberapa kendala/hambatan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan tujuan	4
D. Dasar Hukum	4
E. Aspek – Aspek Strategis	6
F. Isu – Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2021 – 2026	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran	11
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022	12
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022	15
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra	17
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	18
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	19
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	19
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	20
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	22
C. Prestasi / Penghargaan.....	24
BAB IV PENUTUP	25
A. Kesimpulan	25
B. Saran	26
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026.....	L1
B. Rencana Kerja Tahun 2022	L2
C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	L3
D. Pengukuran Kinerja Tahun 2022.....	L4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama / Indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar	9
Tabel 2.2	Tabel Program Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.....	10
Tabel 3.1	Tabel Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022	12
Tabel 3.2	Tabel Perbandingan Capaian Tahun 2022 dan 2021.....	15
Tabel 3.3	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Akhir Periode Renstra 2021-2026.....	17
Tabel 3.4	Tabel Realisasi Kinerja SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2022.....	18
Tabel 3.5	Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2022.....	19
Tabel 3.6	Tabel Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2022.....	20
Tabel 3.7	Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.....	22

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, menempatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan, atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir tahun anggaran sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas, dalam arti mengalami peningkatan/penurunan, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja sasaran strategis. Selanjutnya, dari hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta evaluasi kinerja kebijakan daerah yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2022 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Blitar. Dengan demikian, Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar diharapkan dapat menjadi :

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja;
2. Sarana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;

3. Daya dorong (*supporting unit*) bagi OPD lain untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
- c. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air;
- d. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
- f. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- g. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan gedung;
- h. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan dan lingkungannya;
- i. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sektor bina marga;
- j. Pengembangan jasa konstruksi;
- k. Penyelenggaraan penataan ruang;
- l. Penyelenggaraan pertanahan;
- m. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan;
- n. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- o. Pengelolaan data, informasi, publikasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- p. Pengelolaan data, informasi, publikasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan bidang pertanahan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
- r. Pelaksanaan pelaporan kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- s. Pelaksanaan pelaporan kinerja bidang pertanahan;
- t. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- u. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan di bidang pertanahan;
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai bidang tugas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan.


Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub-Bagian dan 1 (satu) Seksi, sebagaimana struktur organisasi berikut:

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BLITAR
 NOMOR 24 TAHUN 2022
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 AHMAD TOBRONI, S.H.
 NIP. 19670909 199803 1 008

WALIKOTA BLITAR,
 ttd.
 SANTOSO

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar serta sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab kinerja yang telah ditargetkan dan bagaimana proses pencapaiannya. Sedangkan tujuan dari penyusunan LKjIP ini adalah memberikan informasi capaian kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

E. Aspek-aspek Strategis

Aspek-aspek strategis yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, meliputi:

1. Adanya Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar;
2. Visi Kota Blitar yang membutuhkan sarana-prasarana perkotaan yang cukup besar;
3. Ketersediaan sarana-prasarana yang memadai;
4. Kualitas sumber daya manusia yang cukup memadai;
5. Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif;
6. Hubungan koordinasi antar-bidang yang cukup harmonis.

Berdasarkan aspek-aspek strategis sebagaimana tersebut di atas, maka beberapa kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan, jembatan, trotoar, drainase, jaringan irigasi, akses sanitasi layak, akses air minum layak, sarana dan prasarana kota serta bangunan gedung pemerintah;
- b. Peningkatan sarana fasilitas kantor pendukung kegiatan;
- c. Penyusunan revisi RDTR yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

F. Isu-isu Strategis

Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran. Isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar:

1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang dan berkelanjutan;
2. Penguatan sistem jaringan drainase dan jalan di Kota Blitar;
3. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang secara terintegrasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2022 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan ke depan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat mendukung perwujudan Visi dan Misi Kota Blitar. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2022.

Erat kaitannya dengan pencapaian Visi Kota Blitar, yaitu Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, Bermartabat, yang mengerucut pada Misi Kota Blitar keempat yaitu Meningkatkan Infrastruktur dan Tata ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada, serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi Keempat yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama / Indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Blitar

RPJMD KOTA BLITAR						
VISI: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur dan Bermartabat			MISI : 4 Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan			
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks infrastruktur bina marga
					Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks infrastruktur sumber daya air
					Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung pemerintah sesuai standar
					Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi
Meningkatnya kelayakhuan	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas di kawasan permukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas di kawasan permukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD)
					Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dalam pencapaian sasaran dan tujuan selama Tahun 2022 yang didukung dengan program dan kegiatan. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama Tahun 2022 dan keselarasannya dengan pencapaian RENSTRA 2021-2026 diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	76,20 (indeks)
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	97 (indeks)
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	94,60 (%)
4	Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	43,48 (%)
5	Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2,45 (%)
6	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	9,07 (%)
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	40,55 (%)
8	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 84,43 (nilai)

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dijabarkan dalam 11 (sebelas) program sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tabel Program Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Blitar

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan Jalan	19.093.886.247
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12.090.246.519
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3.913.710.571
4	Program Penataan Bangunan Gedung	8.794.050.690
5	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	404.617.846
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	145.117.941
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.618.115.500
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.195.187.140
9	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	14.028.800
10	Program Penatagunaan Tanah	714.246.000
11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.437.388.167
JUMLAH		54.420.595.421

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A.

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
- b. Membandingkan realisasi kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Rumus 2

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria, yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar telah melaksanakan kinerja berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	76,20	77,10	101,18
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	97	97	100
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	94,60	94,60	100

Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	43,48	71,60	164,67
Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2,45	0,25	10,20
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	9,07	0,27	2,98
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	40,55	57,33	141,38
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 84,43	A 84,21	99,74
Rata-rata				90,02

Pada tabel tersebut di atas adalah capaian kinerja pada sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang dijabarkan di bawah ini:

1. Sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Bina Marga, indikator kinerja indeks infrastruktur bina marga, dengan rumus perhitungan Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik pada tahun 2022 ini terealisasi 77,1% dari target 76,20% sehingga tercapai 101,18%. Faktor pendorong tercapainya target salah satunya adalah peran masyarakat yang berperan aktif dalam musrenbang. Dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur bina marga memperoleh atribut **Sangat Berhasil**;
2. Sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air, indikator kinerja indeks infrastruktur sumber daya air dengan rumus perhitungan Rata-rata penjumlahan persentase saluran pengairan + persentase drainase dalam kondisi baik, pada tahun 2022 ini terealisasi 97% dari target 97% sehingga tercapai 100%. Faktor pendorong tercapainya target adalah peran stakeholder dalam peningkatan infrastruktur perkotaan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur sumber daya air memperoleh atribut **Sangat Berhasil**;
3. Sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Cipta Karya, indikator kinerja persentase gedung pemerintah sesuai standar dengan rumus

perhitungan jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah x 100%, pada tahun 2022 ini terealisasi 94,60% dari target 94,60% sehingga tercapai 100%. Faktor yang menjadi pendorong atas keberhasilan ini tidak lepas dari peningkatan kualitas pekerjaan dari penyedia jasa, sehingga dalam persentase gedung pemerintah sesuai standar mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**;

4. Sasaran Meningkatkan Kompetensi Jasa Konstruksi, indikator kinerja persentase peran aktif jasa konstruksi dengan rumus perhitungan jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa konstruksi Kota Blitar x 100%, pada tahun 2022 ini terealisasi 71,60% dari target 43,48% sehingga tercapai 164,67%. Tingkat keberhasilan ini dapat tercapai dengan dukungan peningkatan kompetensi jasa konstruksi, sehingga sasaran meningkatnya kompetensi jasa konstruksi mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**;
5. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan rumus perhitungan jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga x 100%, pada tahun 2022 ini terealisasi 0,25% dari target 2,45% dengan tingkat capaian 10,20%. Sehingga, realisasi tidak sesuai dengan target yang direncanakan, karena pada tahun 2022 tidak mendapat alokasi anggaran untuk DAK air minum untuk SPAM yang berbasis masyarakat dan saat ini sumber dana kegiatan hanya dari DAK. Meskipun demikian, jika dilihat dari angka target dengan angka realisasi, capaian kinerja ini dapat dikatakan **Cukup Berhasil** dengan faktor dukungan peran serta BUMD (PDAM); peran serta masyarakat melalui penyediaan lahan untuk air minum berbasis masyarakat (SPAM Masyarakat) serta peran aktif pemerintah dalam memberikan alokasi anggaran untuk pencapaian air minum yang layak;
6. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), dengan rumus perhitungan jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga x 100%, pada tahun 2022 ini terealisasi 0,27% dari target 9,07% dengan capaian 2,98%. Hal ini dikarenakan sumber dana kegiatan hanya dari DAK, sehingga tidak mencapai target yang direncanakan. Meskipun demikian, jika dilihat dari angka target dengan angka realisasi, capaian kinerja tersebut diatas dapat dikatakan **Cukup Berhasil** dengan adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat terhadap terselenggaranya sanitasi yang layak;

7. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan rumus perhitungan rata-rata penjumlahan persentase perencanaan penataan ruang + persentase pengendalian pemanfaatan ruang, pada tahun 2022 ini terealisasi 57,33% dari target 40,55% sehingga tercapai 141,38%. Faktor yang mendukung dari keberhasilan ini adalah peningkatan peran forum penataan ruang Kota Blitar dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang, sehingga mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**;
8. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan rumus perhitungan nilai SAKIP perangkat daerah, pada tahun 2022 memperoleh nilai A (84,21) dari target nilai A (84,43) atau tercapai 99,74%. Meskipun tidak memenuhi target kinerja, namun perolehan nilai A tidak terlepas dari meningkatnya kinerja perangkat daerah, sehingga mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**.

Dari uraian capaian kinerja tersebut di atas, rata-rata tingkat keberhasilan dari delapan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 ini adalah sebesar 90,02% atau mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021–2022

Perbandingan capaian tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tabel perbandingan capaian tahun 2022 dan 2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	76	81,55	76,20	77,10
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	96	96,10	97	97
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	75	88,27	94,60	94,60
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	NA	NA	43,48	71,60

Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100	98,35	2,45	0,25
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100	96,42	9,07	0,27
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	94,57	98,42	40,55	57,33
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	A 84,43	A 84,43	A 84,21

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijabarkan di bawah ini:

1. Capaian pada sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga pada tahun 2022 dengan target 76,20% terealisasi 77,10% sehingga tercapai 101,18%, namun jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan skala prioritas penanganan infrastruktur belum sepenuhnya sinkron dengan *update database* kondisi infrastruktur;
2. Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air pada tahun 2022 dengan target 97% terealisasi 97% dengan capaian 100% dan mengalami peningkatan kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
3. Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya pada tahun 2022 ini dengan target 94,60% terealisasi 94,60% atau tercapai 100% dan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
4. Capaian kinerja Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi pada tahun 2022 ini dari target 43,48% terealisasi 71,60% atau tercapai 164,67%, namun tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun 2021 terdapat perbedaan pada sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

5. Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM pada tahun 2022 dari target 2,45% terealisasi 0,25% atau tercapai 10,20%, namun tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan pada indikator sasaran;
6. Capaian kinerja Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD pada tahun 2022 dengan target 9,07% terealisasi 0,27% atau tercapai 2,98%, namun tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan pada indikator sasaran;
7. Pada capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun 2022 dengan target 40,55% terealisasi 57,33% atau tercapai 141,38%, namun tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perbedaan pada indikator sasaran;
8. Capaian kinerja keempat yaitu Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A 84,21 tidak melebihi target nilai A 84,43 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mendapat nilai A 84,43. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya indikator yang telah ditentukan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra

Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan 2022 bila dibandingkan dengan akhir periode Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan akhir periode renstra 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

SASARAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI s.d 2022	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	77	77,10	100,13
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	100	97	97
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	95	94,60	99,58

Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	60,87	71,60	117,63
Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3,44	0,25	7,27
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10,56	0,27	2,56
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	58,21	57,33	98,49
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 86	A 84,21	97,92

Pada sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Bina Marga pada tahun 2022 terealisasi 77,10% dan melebihi target pada akhir periode renstra 77%, hal ini dikarenakan peran *stakeholder* dalam peningkatan infrastruktur; peran masyarakat yang berperan aktif dalam musrenbang; serta peningkatan kualitas pekerjaan dari penyedia jasa. Sedangkan pada sasaran Meningkatkan Kompetensi Jasa Konstruksi pada tahun 2022 terealisasi 71,60% dan melebihi target pada akhir periode renstra 60,87%, hal ini dikarenakan peningkatan kompetensi jasa konstruksi.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Pada tahun 2022 dapat dilihat realisasi SPM sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Tabel realisasi kinerja SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi Tahun 2022	%
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	92	98,38	106,93 %

Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	96	98,27	102,36 %
---	--	----	-------	----------

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, pada meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas di kawasan permukiman, indikator persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan terealisasi 98,27% dari target 96% tercapai 102,36% dan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu 96,42%. Hal ini tidak lepas dari partisipasi dan dukungan dari masyarakat terhadap terselenggaranya sanitasi yang layak. Sedangkan untuk indikator persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan terealisasi 98,38% dari target 92% tercapai 106,93% dan juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu 98,35%, peningkatan ini dapat tercapai karena beberapa faktor pendukung di antaranya peran serta BUMB dalam hal ini PDAM; peran serta masyarakat melalui penyediaan lahan untuk air minum berbasis masyarakat (SPAM masyarakat); dan peran aktif Pemerintah dalam memberikan alokasi anggaran untuk capaian air minum yang layak.

B. Akuntabilitas Keuangan (*Cost per Outcome*)

1. Alokasi per Sasaran Pembangunan

Untuk mencapai target kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung dengan penganggaran yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.5
Tabel Alokasi per Sasaran Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	Program penyelenggaraan jalan	19.093.886.247
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	Program pengelolaan sumber daya air	12.090.246.519
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	Program penataan bangunan gedung	8.794.050.690
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	Program pengembangan jasa konstruksi	404.617.846

Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	145.117.941
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	1.618.115.500
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	3.913.710.571
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program penyelenggaraan penataan ruang	1.195.187.140
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	6.437.388.167
JUMLAH			53.692.320.621

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja juga didukung dengan realisasi anggaran. Pada tahun 2022 pencapaian kinerja dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Tabel pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2022

PROGRAM	INDIKATO	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	99,20	99,20	100	19.093.886.247	17.269.372.192,88	90,44
	Persentase jembatan dalam kondisi baik	99,60	99,60	100			
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	96	96	100	12.090.246.519	11.805.415.500	97,64

PROGRAM	INDIKATO	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	83,33	83,33	100	8.794.050.690	7.575.512.513	86,14
	Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	82,61	82,61	100			
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi	100	100	100	404.617.846	295.712.587	73,08
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase SPAM dalam kondisi baik	88,80	88,80	100	145.117.941	110.338.000	76,03
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik	Persentase SPALD dalam kondisi baik	82	82	100	1.618.115.500	1.521.892.866	94,05
Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	98	98	100	3.913.710.571	3.816.804.800	97,52
Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	76,32	100	131	1.195.187.140	1.114.482.846,80	93,25
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A 84,43	A 84,21	99,74	6.437.388.167	6.111.006.595,72	94,93

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran dapat dilihat efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7
Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2022

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Capaian Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5 = 3/4
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	101,18	90,44	1,12
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	100	97,64	1,02
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	100	86,14	1,16
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	164,67	73,08	2,25
Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2,98	76,03	0,04
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10,20	95,79	0,11
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	141,38	93,25	1,52
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	99,74	94,93	1,05

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya di atas adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1 dengan indikator kinerja Indeks Infrastruktur Bina Marga tingkat efisiensinya sebesar 1,12%, bahwa dengan capaian kinerja 101,18%

- membutuhkan anggaran sebesar 90,44% dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada sasaran ini dikatakan efisien. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program Penyelenggaraan Jalan;
- ii. Sasaran 2 dengan indikator kinerja Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air tingkat efisiensinya sebesar 1,02% bahwa dengan capaian kinerja 100% membutuhkan anggaran sebesar 97,64% dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada sasaran ini dikatakan efisien. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - iii. Sasaran 3 dengan indikator kinerja Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar tingkat efisiensinya sebesar 1,16%, bahwa dengan capaian kinerja 100% membutuhkan anggaran sebesar 86,14% dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada sasaran ini dikatakan efisien. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program Program Penataan Bangunan Gedung;
 - iv. Sasaran 4 dengan indikator kinerja Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi tingkat efisiensi sebesar 2,25%, bahwa dengan capaian kinerja 164,67% membutuhkan anggaran sebesar 73,08% dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan efisien. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - v. Sasaran 5 dengan indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tingkat efisiensi sebesar 0,04%, bahwa dengan capaian kinerja 2,98% membutuhkan anggaran sebesar 76,03% dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan belum efisien, ke depan perlu pemberian sosialisasi yang masif terhadap masyarakat tentang kualitas air sumur rumah tangga yang ada di Kota Blitar;
 - vi. Sasaran 6 dengan indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) tingkat efisiensi sebesar 0,11, bahwa dengan capaian kinerja 10,20% membutuhkan anggaran sebesar 95,79%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan belum efisien, ke depan perlu pemberian sosialisasi yang masif kepada pemerintah akan pentingnya pengelolaan sanitasi yang layak;
 - vii. Sasaran 7 dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang, tingkat efisiensi sebesar 1,52%, bahwa dengan capaian kinerja 141,38% membutuhkan anggaran sebesar 93,25%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan efisien. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - viii. Sasaran 3 dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah tingkat

efisiensi sebesar 1,05%, bahwa dengan capaian kinerja 99,74% membutuhkan anggaran sebesar 94,93% dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemcapaian sasaran ini dikatakan efisien. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

C. Prestasi/Penghargaan

Selama tahun 2022 prestasi/penghargaan yang diperoleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Blitar adalah Sebagai Pemenang I (Kategori Pemerintah Kota) Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Kebinaamargaan dalam rangka Hari Jalan 2022



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Di lain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Dari analisis capaian kinerja dapat disimpulkan pada sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga dengan indikator indeks infrastruktur bina marga dari target 76,20% telah terealisasi 77,01% pada tahun 2022 atau tercapai 101,18%. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air dengan indikator indeks infrastruktur sumber daya air dari target 97 % telah terealisasi 97 % atau tercapai 100%. Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya dengan indikator persentase gedung pemerintah sesuai standar dari target 94,60% terealisasi 94,60% atau tercapai 100%. Sasaran 4 yaitu Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi dengan indikator persentase peran aktif jasa konstruksi dari target 43,48% terealisasi 71,60% atau tercapai 164,67%. Sasaran 5 yaitu Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sistem penyediaan air minum (SPAM) dari target 2,45% terealisasi 0,25% atau tercapai 10,20%. Sasaran 6 yaitu Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dari target 9,07% terealisasi 0,27% atau tercapai 2,98%. Sasaran 7 yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan indikator persentase penyelenggaraan penataan ruang dari target 40,55% terealisasi 57,33% atau tercapai 141,38%. Sasaran 8 yaitu Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari target A 84,43 terealisasi A 84,21 atau tercapai 99,74%.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2022 dapat dikatakan baik, walaupun masih dijumpai banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Tindak lanjut perbaikan ke depan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, yaitu:

1. Optimalisasi fungsi pengendalian dan melaksanakan penyusunan revisi RDTR dan revisi RTRW sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Sinkronisasi dan koordinasi terkait rencana kegiatan berdasarkan updating database kondisi infrastruktur;
3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan gedung;
4. Optimalisasi pengelolaan air limbah; dan
5. Peningkatan akses air minum.

Demikian beberapa hal yang disampaikan dalam LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar.

MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR
TAHUN 2021 - 2026

VISI : KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT

MISI : Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

TUJUAN		SASARAN				CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET			
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2022	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN		KONDISI AWAL 2020	TARGET 2022	STRATEGI
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	70% Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum + 30% Level of Service	58,07	58,27	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	50% Bina Marga + 40% Sumber Daya Air + 10% Cipta Karya	85,47	86,36	Peningkatan ketersediaan dan kualitas jalan dan jembatan	Optimalisasi pemeliharaan jalan dan utilitasnya
											Peningkatan ketersediaan jalan dan utilitasnya
											Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan utilitasnya
											Peningkatan ketersediaan jembatan
											Optimalisasi pemeliharaan jembatan

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2022	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2022	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
										Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan irigasi	Peningkatan ketersediaan jaringan irigasi		
											Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi		
										Peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan gedung	Pengembangan/kajian standarisasi pemeliharaan bangunan gedung		
											Peningkatan ketersediaan bangunan gedung		
										Optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan	Peningkatan ketersediaan fasilitas umum skala kota		
											Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas umum skala kota		

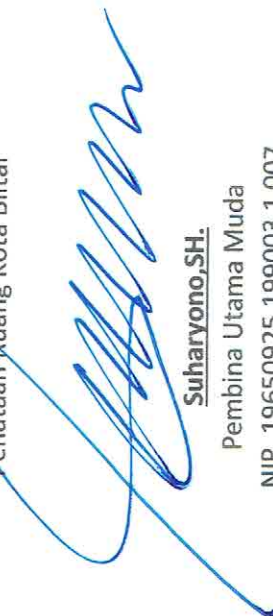
TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2020	2022				2020	2022				
										Peningkatan kualitas jasa konstruksi	Peningkatan kapasitas tenaga konstruksi		
											Peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi		
											Peningkatan pengelolaan jasa konstruksi melalui sistem informasi		
					Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana dan utilitas di kawasan permukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	95,14	96	Optimalisasi pengelolaan air limbah	Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL		

TUJUAN		SASARAN				CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KET			
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2022	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020		TARGET 2022	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	luas lahan yang sesuai tata ruang dibagi total luas lahan	95,30	95,35	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang	Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi tata ruang	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sistem informasi tata ruang
											Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang	Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang
										Pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan tindak lanjut terhadap penyimpangan peraturan tata ruang	

TUJUAN				SASARAN				CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN				KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2022	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2022	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	

Blitar, 3 Agustus 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Blitar



Suharyono,SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650925 199003 1 007

RENCANA KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah
Indikator : Indeks Infrastruktur Daerah

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET				
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	58,27%	Program penyelenggaraan jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	99,20	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi	3,20	Rehabilitasi jalan	Panjang utilitas jalan yang direhabilitasi	1.988	13.095.670.300			
					Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	99,60			4,08	Pemeliharaan berkala jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan berkala	98		3.338.477.369		
									100,00	Pemeliharaan rutin jalan	Persentase jalan yang dibangun		Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin	Panjang utilitas jalan yang dipelihara	760	2.359.738.578
													Jumlah alat berat yang dipelihara	Jumlah alat berat yang tersedia	560	
										Jumlah alat berat yang tersedia	1		300.000.000			

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
				Program pengelolaan sumber daya air	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	96,00	Pengelolaan SDA dan bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase talud yang dibangun	20,00	Pembangunan tanggul sungai	Panjang talud yang dibangun	75	946.969.376
								Persentase talud yang direhabilitasi	20,35	Rehabilitasi tanggul sungai	Panjang talud yang direhabilitasi	310	3.703.387.133
				Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota				Persentase jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan	6,56	Peningkatan jaringan irigasi permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	1.075	5.466.173.252
											Jumlah dokumen yang tersusun	1	
											Jumlah alat survey yang tersedia	3	
								Persentase jaringan irigasi yang dibangun	-	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Panjang jaringan pengairan/ irigasi yang dipelihara	2.116	1.973.716.758
				Program penataan bangunan gedung	Persentase gedung pemerintah yang dibangun	83,33	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah jenis penyelenggaraan bangunan gedung	2,00	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan ,Bangunan (IMB) Setifikat Laik ,Fungsi (SLF) Peran Tenaga Ahli Bangunan ,Gedung (TABG) Pendataan	Jumlah surat ketetapan retribusi yang diterbitkan	300	199.999.036
											Jumlah sistem informasi yang terupdate	1	

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
					Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	82,61				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan direhabilitasi	5	8.534.609.554
											Jumlah fasilitas umum yang dibangun dan direhabilitasi	1	
											Jumlah dokumen yang tersusun	1	
										Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tersusun	1	59.442.100
											Jumlah peserta sosialisasi	100	
				Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar	100,00	Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	68,25	Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	Jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi peraturan jasa konstruksi	340	238.605.500

NO	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET		
																URAIAN	
							Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPIAKI	20	Pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi	Jumlah konsultasi/pendampingan teknis layanan jasa konstruksi	10		Jumlah norma, standar, prosedur dan atau kriteria jasa konstruksi yang tersusun	30	11.250.000	
										Penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	Jumlah aplikasi yang dijalankan	1				37.290.000	
										Penyusunan data dan informasi profil pekerjaan konstruksi	Jumlah data dan informasi pekerjaan konstruksi	2				117.472.346	
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas di kawasan permukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	96,00	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase SPALD dalam kondisi baik	82,00	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Persentase SPALD yang terbangun	57,89	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah peserta sosialisasi sanitasi perkotaan	150				52.335.500	

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Rehabilitasi/Perluasan Ruang Rumah yang dibangun/dipelihara	Jumlah sambungan rumah yang dibangun/dipelihara	25	239.000.000
										Pembangunan/Perbaikan Sistem Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah prasarana IPAL yang dibangun	1	502.780.000
										Pembangunan/Perbaikan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah tanki septik yang dibangun	10	824.000.000
										Pembangunan sistem drainase perkotaan	Panjang saluran drainase yang dibangun	2.763	3.489.151.371
										Operasi dan pemeliharaan sistem drainase	Panjang saluran drainase yang dipelihara	400	424.559.200

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
		Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	92,00	Program pengelolaan dan pengembangan an sistem penyediaan air minum	Persentase SPAM dalam kondisi baik	88,80	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota	Persentase SPAM yang terbangun	57,89	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Jumlah peserta sosialisasi air minum perkotaan	100	145.117.941
3	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	95,35	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	76,32	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun	2,00	Pelaksanaan persetujuan, substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR kabupaten/kota	Jumlah RRTR yang tersusun	2	559.113.180
											Jumlah peserta sosialisasi	128	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sistem informasi tata ruang	76,32	Sistem informasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate	1	50.000.000

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketidaksiharian tata ruang yang ditindaklanjuti	4,78	Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Jumlah fasilitasi dan koordinasi evaluasi tata ruang	1	586.073.960

Blitar, 5 Agustus 2022
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Blitar



Suharyono,SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199003 1 007

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARYONO,SH.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd
Jabatan : WALIKOTA BLITAR
Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

WALIKOTA BLITAR



Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 18 Oktober 2022
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Blitar



SUHARYONO,SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509251990031007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR**

NO	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84.43 (nilai)
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	40.55 (%)
3	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	1. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik(SPALD)	9.07 (%)
4	Meningkatnya Akses Air Minum Yang Layak Melalui SPAM	2. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.45 (%)
5	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	2. Indeks Infstruktur Sumber Daya Air	97.00 (indeks)
6	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	3. Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	94.60 (%)
7	Meningkatnya kompetensi Jasa konstruksi	4. Persentase Peran Aktif Jasa konstruksi	43.48 (%)
8	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga	1. Indeks Infrastruktur Bina Marga	76.20 (indeks)

No	PROGRAM	Anggaran	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.437.388.167,00	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	12.090.246.519,00	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	145.117.941,00	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.618.115.500,00	DAU dan DAK
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.913.710.571,00	APBD
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.794.050.690,00	APBD
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	19.093.886.247,00	DAU dan DAK
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	404.617.846,00	APBD
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.195.187.140,00	APBD
10	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	14.028.800,00	APBD
11	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	714.246.000,00	APBD
JUMLAH		54.420.595.421,00	

WALIKOTA BLITAR



Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 18 Oktober 2022
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar



SUHARYONO,SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509251990031007

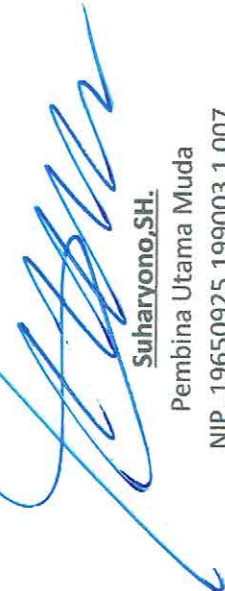
**PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

**Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tahun : 2022**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	76,20	77,10	101,18		Program penyelenggaraan jalan	19.093.886.247	17.269.372.192,88	90,44	
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	Rata-rata penjumlahan persentase saluran pengairan + persentase drainase dalam kondisi baik	97	97	100,00		Program pengelolaan sumber daya air	12.090.246.519	11.805.415.500	97,64	
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah x 100%	94,60	94,6	100,00		Program penataan bangunan gedung	8.794.050.690	7.575.512.513	86,14	
4	Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	Jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa konstruksi Kota Blitar x 100%,	43,48	71,60	164,67		Program pengembangan jasa konstruksi	404.617.846	295.712.587	73,08	
5	Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga x 100%	2,45	0,25	10,20		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	145.117.941	110.338.000	76,03	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga x 100%	9,07	0,27	2,98		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	1.618.115.500	1.521.892.866	94,05	
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rata-rata penjumlahan persentase perencanaan penataan ruang + persentase pengendalian pemanfaatan	40,55	57,33	141,38		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	3.913.710.571	3.816.804.800	97,52	
8	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	nilai SAKIP perangkat daerah	A 84,43	A 84,21	99,74		Program penyelenggaraan penataan ruang	1.195.187.140	1.114.482.846,80	93,25	
								Program penunjang urusan pemerintahan daerah	6.437.388.167	6.111.006.595,72	94,93	

Blitar, Februari 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar



Suharyono,SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650925 199003 1 007